

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan diskusi, PBB dan BPHTB akan memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020–2024.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Kesimpulan tersebut dibuktikan melalui hasil uji parsial yang menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,058 lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 2,014 serta nilai signifikansi sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. PBB menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi penting karena pemungutannya dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh objek pajak yang relatif stabil. Laporan Rincian Realisasi Pendapatan Sektor Perpajakan juga menunjukkan bahwa PBB merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil uji parsial yang menghasilkan nilai t-hitung sebesar 1,638 dengan nilai signifikansi sebesar 0,477 yang lebih besar dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan penerimaan BPHTB belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan PAD. Fluktuasi penerimaan BPHTB yang dipengaruhi oleh aktivitas transaksi tanah dan bangunan menyebabkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah menjadi tidak konsisten. Meskipun demikian, BPHTB tetap merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berpotensi meningkatkan PAD apabila terjadi peningkatan aktivitas jual beli maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam jumlah yang signifikan.

3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Hasil uji F menghasilkan nilai F-hitung sebesar 3,201 yang lebih besar dibandingkan nilai F-tabel sebesar 3,16 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 yang berada di bawah 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi secara kolektif dalam memengaruhi PAD. Pengaruh simultan tersebut mencerminkan bahwa penerimaan daerah tidak hanya ditentukan oleh satu jenis pajak saja melainkan oleh kombinasi berbagai sumber pendapatan yang saling melengkapi. Tingkat kesadaran wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta efektivitas pengelolaan pajak daerah menjadi faktor penting yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri secara berkelanjutan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, terdapat keterbatasan yang dihadapi dan beberapa faktor yang menghambat dalam proses penelitian, antara lain :

1. Periode penelitian dibatasi hingga 5 tahun, dari tahun 2020 hingga 2024.
2. Pajak Akuisisi Tanah dan Bangunan (disingkat PBB dan BPHTB) adalah satu-satunya variabel independen yang disertakan dalam analisis ini. Analisis ini tidak memperhitungkan faktor lain yang dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Data dalam penelitian ini menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun yang dapat mempengaruhi kestabilan hasil analisis.
4. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas pada variabel Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang mampu diterapkan, seperti :

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan di dunia nyata kecuali dilakukan penelitian lebih lanjut dalam jangka waktu lebih lama.
 - b. Penelitian tambahan disarankan untuk memasukkan elemen lain yang berpotensi memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Penelitian selanjutnya disarankan memakai metode penanganan heteroskedastisitas yang lebih komperhensif, seperti penerapan *robust standard error*, *weighted least squares*, atau menggunakan metode estimasi alternative yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap pelanggaran asumsi klasik.
2. Bagi pemerintah
 - a. Data subjek pajak dan objek pajak wajib diperbarui setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk memastikan keakuratannya.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi dan wawasan untuk penilaian strategi fiskal berbasis data dan analisis empiris guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
 - c. Untuk mengurangi ketidakpastian penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat mendorong wajib pajak untuk membayar bagian pajak yang adil.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil uji statistik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Temuan ini mengimplikasikan bahwa PBB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang stabil dan berkelanjutan, mengingat objek pajaknya bersifat tetap dan tersebar luas. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat Teori Keuangan Publik yang menekankan peran pajak daerah sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Wonogiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa kontribusi BPHTB terhadap PAD masih bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada intensitas transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh relatif rendahnya aktivitas jual beli properti, nilai transaksi yang belum optimal, atau masih adanya kendala dalam pengawasan dan administrasi pemungutan BPHTB.

Dari sisi kebijakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu memprioritaskan optimalisasi PBB melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penyesuaian NJOP yang lebih akurat, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, meskipun BPHTB tidak berpengaruh signifikan, pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemungutannya, memperkuat koordinasi dengan PPAT, serta mendorong iklim investasi dan perkembangan sektor properti agar potensi BPHTB dapat meningkat di masa mendatang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Wonogiri lebih efisien dicapai melalui manajemen PBB yang baik dibandingkan pada BPHTB. Dengan strategi pengelolaan pajak daerah yang tepat, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.